

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR RESTU ARTHA ABADI
TAHUN 2025**



**Jl. Solo – Yogyakarta, Jatirejo, Karanganyar, Klaten Utara,
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
TELEPON: (0272) 326262**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Restu Artha Abadi
Alamat	Jl. Solo – Yogyakarta, Jatirejo, Kel Karanganom, Kec Klaten Utara, Kab Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Telepon	(0272) 326262

Penjelasan Umum:

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi serta perkembangan jenis produk dan jasa lembaga jasa keuangan, maka kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat dan tantangan juga semakin besar. Selain itu, masih ada dampak tekanan di beberapa sektor usaha akibat dari ketidakpastian ekonomi, dimana telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Pada tahun 2025, BPR Restu Artha Abadi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Sehingga pada tahun tersebut, kinerja BPR Restu Artha Abadi mengalami peningkatan dan pertumbuhan kinerja keuangan yang baik. Penerapan Tata Kelola pada BPR Restu Artha Abadi didukung oleh integritas serta proses intern yang melibatkan seluruh organ Bank, baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Restu Artha Abadi.

BPR Restu Artha Abadi senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Selain itu dalam penerapan Tata Kelola, kami selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun berikutnya, BPR Restu Artha Abadi terus berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Maksur Istanto
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, anggaran dasar BPR serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;2. Merealisasikan pencapaian target/ sasaran kinerja keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana bisnis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi BPR;3. Melaksanakan tata kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antar bagian/ unit kerja yang menangani operasional, bisnis dan penunjang operasional lainnya;4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;5. Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;6. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dalam rangka efektifitas pengawasan aktif sebagaimana ketentuan dalam manajemen risiko BPR;7. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dalam bidang kepegawaian kepada seluruh SDM / pegawai BPR;8. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada dewan komisaris dan pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.	
2.	Nama	Tulus Sugiyanto
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis adalah sebagai berikut:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu tugas Direktur utama dalam memastikan proses bisnis Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan bisnis Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;4. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Bisnis Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank;5. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya;6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama;	

7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang bisnis kepada pegawai.

3.	Nama	Wikan Pawitra Hapsari
----	------	-----------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Direktur Operasional memastikan kelancaran kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;
4. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan operasional BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang;
5. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya;
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama;
7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang operasional kepada pegawai.

4.	Nama	Mohammad Taufik Nugroho
----	------	-------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Direktur Kepatuhan, memastikan kegiatan Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;
4. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
5. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang;
6. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis;
2. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat;

3. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dengan memadai yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku, dan apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR;
4. Memperbaiki kualitas kredit dan memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan dan/atau NPL serta melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain : pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani bisnis, operasional, audit intern, manajemen risiko dan kepatuhan;
7. Menyediakan data dan informasi laporan yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Novian Chandra Dewantara
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS; 2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank; 5. Meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya; 6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. 	
2.	Nama	Priyangga Wahyu Wibowo
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS; 2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank 5. Meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya; 	

6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

3.	Nama	Subandi
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS; 2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank 5. Meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya; 6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. 		

Rekomendasi Kepada Direksi:

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2025 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, guna mendukung perkembangan usaha di masa mendatang sehingga penyaluran kredit tumbuh berkualitas, penyerapan DPK juga bertumbuh serta rasio tingkat kesehatan tetap terjaga sehat;
2. Diharapkan manajemen mengoptimalkan seluruh jaringan kantor yang ada sehingga semua sumber daya yang ada bisa berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja;
3. Fokus pada segmentasi target UMKM dan selalu berupaya untuk memperkuat positioning pasar;
4. Peningkatan kualitas tenaga pemasaran dengan pelatihan dan monitoring yang baik;
5. Penetasi pasar secara optimal sesuai dengan strategi pemasaran yang dibuat dan sesuai dengan potensi pasar di masing-masing wilayah kantor BPR;
6. Disiplin pada proses kredit, penanganan tunggakan dan manajemen NPL. Mapping debitur bermasalah dilakukan dengan ketat dan solusi penyelesaian jelas;
7. Optimalisasi teknologi pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja;

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	01. Komite Audit
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan

	<p>proses pelaporan keuangan.</p> <p>2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).</p> <p>b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.</p> <p>c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.</p> <p>d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>f. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.</p> <p>h. Menyusun dan/ atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit</p>
Jumlah Rapat	4
<p>Program Kerja Komite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat komite pembentukan piagam Komite Audit 2. Review Laporan Audit Inventory Kas & Jaminan seluruh cabang 3. Review laporan keuangan & GCG; Review Laporan Audit Internal, Rapat Komite Audit Kuartal I 4. Rapat Komite Semester 1 ; Evaluasi RBB semesteran, Evaluasi KAP 2025 semester 1 5. Rapat KA Q 3 6. Rapat Komite Q 4, Finalisasi rencana kerja komite audit 2026 7. Finalisasi laporan komite audit tahunan, Laporan efektifitas SKAI, Rekomendasi Penunjukkan KAP 2026 <p>Realisasi Program Kerja Komite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat komite pembentukan piagam Komite Audit 	

2. Review Laporan Audit Inventory Kas & Jaminan seluruh cabang
3. Review laporan keuangan & GCG; Review Laporan Audit Internal, Rapat Komite Audit Kuartal I
4. Rapat Komite Semester 1 ; Evaluasi RBB semesteran, Evaluasi KAP 2025 semester 1
5. Rapat KA Q 3
6. Rapat Komite Q 4, Finalisasi rencana kerja komite audit 2026
7. Finalisasi laporan komite audit tahunan, Laporan efektifitas SKAI, Rekomendasi Penunjukkan KAP 2026

2.	Komite Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	02. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. 2. Komite pemantau risiko bertugas membantu memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dalam rangka untuk meningkatkan kinerja BPR 3. Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan : a. Evaluasi Konsisten antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko c. Komite Pemantau Risiko wajib Menyusun dan/ memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko d. Melakukan review pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari : e. Laporan profil risiko konsolidasi dengan perusahaan cabang (profil risiko terintegrasi) f. Laporan tingkat kesehatan bank berba sis risiko konsolidasi dengan perusahaan cabang (profil risiko terintegrasi) g. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik h. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu : • Menentukan rencana kerja tahunan. • Menentukan jadwal rapat tahunan.
-----------	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris. • Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk : Menyelenggarakan rapat secara teratur/rutin, Mempelajari materi rapat terlebih dahulu, Menghadiri rapat, Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan komite, Membuat risalah rapat, Melakukan kunjungan kerja ke lapangan.
Jumlah Rapat	4	
Program Kerja Komite:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat komite pembentukan piagam Komite Pemantau Risiko 2. Review Laporan Manajemen Risiko dan Kepatuhan setiap bulan 3. Rapat Komite Audit Kuartal I 4. Rapat Komite Semester 1 ; Evaluasi RBB semesteran, Evaluasi Laporan TKS, Tata Kelola, Profil Risiko, Pelaksanaan Tugas direktur Kepatuhan 5. Rapat KA Q 3 6. Rapat Komite Q 4, Menilai Efektifitas Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan membuat laporan Tahunan ; Finalisasi rencana kerja komite audit 2026 		
Realisasi Program Kerja Komite:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat komite pembentukan piagam Komite Pemantau Risiko 2. Review Laporan Manajemen Risiko dan Kepatuhan setiap bulan 3. Rapat Komite Audit Kuartal I 4. Rapat Komite Semester 1 ; Evaluasi RBB semesteran, Evaluasi Laporan TKS, Tata Kelola, Profil Risiko, Pelaksanaan Tugas direktur Kepatuhan 5. Rapat KA Q 3 6. Rapat Komite Q 4, Menilai Efektifitas Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan membuat laporan Tahunan ; Finalisasi rencana kerja komite audit 2026 		
3.	Komite	03. Komite Remunerasi dan Nominasi
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Manusia. 4. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi. 5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh

	<p>dan menganalisa data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi.</p> <p>6. Memiliki data base dan talent pool calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.</p> <p>9. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan otoritas terkait.</p> <p>10. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta Komite Pemantau Resiko dan Good Corporate Governance</p> <p>11. Menentukan rencana kerja tahunan</p> <p>12. Menyelenggarakan rapat secara teratur;</p> <p>13. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;</p> <p>14. Menghadiri rapat;</p> <p>15. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;</p> <p>16. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>17. Menunjuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris komite untuk mencatat rapat komite dan membuat risalah rapat komite.</p>
Jumlah Rapat	0

Program Kerja Komite:

1. Menyusun & mengusulkan Struktur Skala Upah Karyawan 2026 kepada Dirkom
2. Pengelolaan Kinerja: Mendorong pelaksanaan penilaian kinerja karyawan bulanan & tahunan secara efektif sebagai dasar perhitungan insentif karyawan.
3. Memastikan kesejahteraan karyawan melalui pengelolaan cuti, pelatihan, dan program pengembangan lainnya.

Realisasi Program Kerja Komite:

Belum terlaksana karena draft SOP Remunerasi & Nominasi Karyawan masih dalam

tahapan review Dirkom.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Novian Chandra Dewantara
	Keahlian	Manajemen Risiko, Keuangan
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
2.	Nama Anggota Komite	Priyangga Wahyu Wibowo
	Keahlian	Audit Internal, Keuangan
	Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	01. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
3.	Nama Anggota Komite	Subandi
	Keahlian	Keuangan, Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan

	dan Nominasi	Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak

4.	Nama Anggota Komite	I Wayan Eka Prawita Utama
	Keahlian	Keuangan, Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya

5.	Nama Anggota Komite	Daniel
	Keahlian	HR
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Maksur Istanto
----	------	----------------

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Tulus Sugiyanto
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Wikan Pawitra Hapsari
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
4.	Nama	Mohammad Taufik Nugroho
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Novian Chandra Dewantara
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Priyangga Wahyu Wibowo
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Subandi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak ada kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Santoso Soegiarto, IR
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT Yasaniaga Utama Mulia
	Persentase Kepemilikan (%)	50,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	50,00
2.	Nama	Ratnawati, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT Yasaniaga Utama Mulia

Persentase Kepemilikan (%)	50,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	50,00

Tidak ada kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Maksur Istanto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Tulus Sugiyanto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Wikan Pawitra Hapsari
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
4.	Nama	Mohammad Taufik Nugroho
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Novian Chandra Dewantara
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Priyangga Wahyu Wibowo
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Subandi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak adsa kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Maksur Istanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Tulus Sugiyanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Wikan Pawitra Hapsari
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
4.	Nama	Mohammad Taufik Nugroho
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada

	Pemegang Saham Lain di BPR
--	----------------------------

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Novian Chandra Dewantara
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Priyangga Wahyu Wibowo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Subandi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Maksur Istanto
-----------	------	-----------------------

	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Tulus Sugiyanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Wikan Pawitra Hapsari
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
4.	Nama	Mohammad Taufik Nugroho
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Novian Chandra Dewantara
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

2.	Nama	Priyangga Wahyu Wibowo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Subandi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.274.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp760.500.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp250.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp255.000.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
--	----------------

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	5,69 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,43 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,05 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,50 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,35 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	06 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Tahun 2024, Pembahasan APU PPT, Evaluasi Manajemen Resiko Semester II Tahun 2024		
2.	Tanggal Rapat	15 April 2025
	Jumlah Peserta	3 orang

Topik/Materi Pembahasan:					
Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Triwulan I 2025					
3.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>15 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>3 orang</td> </tr> </table>	Tanggal Rapat	15 Juli 2025	Jumlah Peserta	3 orang
Tanggal Rapat	15 Juli 2025				
Jumlah Peserta	3 orang				
Topik/Materi Pembahasan:					
Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Semester I Tahun 2025, Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Semester I Tahun 2025					
4.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>07 Oktober 2025</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>3 orang</td> </tr> </table>	Tanggal Rapat	07 Oktober 2025	Jumlah Peserta	3 orang
Tanggal Rapat	07 Oktober 2025				
Jumlah Peserta	3 orang				
Topik/Materi Pembahasan:					
Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Triwulan III Tahun 2025					

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NOVIAN CHANDRA DEWANTARA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	PRIYANGGA WAHYU WIBOWO
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	SUBANDI
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	1 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	1 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Terjadi 1 (satu) kasus penyimpangan internal (Fraud) pada periode pelaporan

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	----------------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	2 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	----------------

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada periode pelaporan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	23 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Polsek Sleman
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Dana Ke Polsek Sleman Untuk Bantuan Kursi Rapat
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	17 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	WARGA SEKITAR
	Penjelasan Kegiatan	BIAYA BAGI TAKJIL CABANG SOLO
	Jumlah (Rp)	Rp550.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DESA DAGEN
	Penjelasan Kegiatan	SUMBANGAN SOSIAL ZAKAT FITRAH DESA DAGEN TAHUN 2025
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	31 Mei 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PMI
	Penjelasan Kegiatan	Bulan Dana PMI
	Jumlah (Rp)	Rp400.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	05 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Rosyid Jatirejo
	Penjelasan Kegiatan	CSR Hewan Qurban
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	08 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DESA DAGEN
	Penjelasan Kegiatan	SUMBANGAN SOSIAL HUT RI KE-80 DESA DAGEN
	Jumlah (Rp)	Rp400.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	KELURAHAN KARTASURA
	Penjelasan Kegiatan	SUMBANGAN DLM RK MEMPERINGATI HUT KEMERDEKAAN RI KE 80
	Jumlah (Rp)	Rp420.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR Restu Artha Abadi untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Klaten, 30 April 2026

BPR Restu Artha Abadi



Novian Chandra Dewantara
Komisaris Utama



Malsur Istanto
Direktur Utama